



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

Monita Yuda Liantara

140810301158

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

Monita Yuda Liantara

140810301158

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. ALLAH SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan di selesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa;
2. Kedua orang tercinta, dan segenap keluarga yang telah mendoakan dan memberi motivasi, dorongan, semangat dan pengorbanan selama ini. Tiada kata seindah lantunan doa yang terucap. Ucapan terimakasih saja tak akan cukup untuk membalas kebaikan., karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kaian;
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengjar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu teringat dan tersimpan dihati;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu menjadi kebanggaan.
5. Sahabat-sahabat tercinta Ficrine, Dhinar, Puji terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Dan sahabat-sahabat kampus Mega, Siska, Yayik. Terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Dan terimakasih saya ucapkan kepada Mas Arie atas dukungan dan semangat selama ini.

MOTTO

فَأَنْصَبْ فَرَّغْتَ فَإِذَا

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S. AL-Insyirah : 7)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monita Yuda Liantara

NIM : 140810301158

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPR ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyertakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 juli 2018

Yang menyatakan,

Monita Yuda Liantara

NIM 140810301158

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI
SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPRS ASRI
MADANI NUSANTARA JEMBER**

Oleh

Monita Yuda Liantara

NIM 140810301158

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sudarno, M.Si, Ak. CA.

Dosen pembimbing Anggota : Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah
Dalam Pendistribusian Laba Pada Bprs Asri Madani
Nusantara Jember

Nama Mahasiswa : Monita Yuda Liantara

NIM : 140810301158

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 1 Juni 2018

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA.

NIP. 196012251989021001

Nur Hisamuddin, SE, M.SA, Ak, CA.

NIP. 197910142009121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak.

NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Monita Yuda Liantara
NIM : 140810301158
Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, CA. (.....)
NIP.197102172000031001
Sekretaris : Novi Wulandari Widiyanti, SE, M.Acc&Fin, Ak, CA. (.....)
NIP. 198011272005012003
Anggota : Kartika, SE, M.Si, Ak, CA. (.....)
NIP. 198202072008122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE, M.M, Ak, CA.

NIP. 197107 27199512 1001

ABSTRAK

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENDISTRIBUSIAN LABA PADA BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA JEMBER**

Monita Yuda liantara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah menerapkan nilai Islam yaitu nilai keadilan dalam pendistribusian labanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data-data perusahaan mengenai pendistribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu aturan dalam Islam untuk menilai keadilan secara objektif. Objek penelitian adalah BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para pihak yang terkait yaitu nasabah, karyawan dan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh dengan membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. Karena perusahaan masih belum bisa memenuhi kriteria keadilan untuk karyawan.

Kata Kunci :Pendistribusian laba, Akuntansi Syariah, Keadilan, Perbankan Syariah, *Syariah Enterprise Theory*

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SHARIA ACCOUNTING JUSTICE
PRINCIPLES IN DISTRIBUTION OF INCOME ON BPRS ASRI MADANI
NUSANTARA JEMBER**

Monita Yuda Liantara

Accounting Department, Economics faculty

Universitas of Jember

This study aims to determine whether companies that implement sharia accounting has applied the value of Islam is the value of justice in the distribution of profit. This research uses descriptive analysis method where company data about distributors profit as well as other data supporting the research is collected then the data is analyzed by describing and comparing with the rules that apply the rules in Islam to judge objectively . The object of research is Bprs Asri Madani Nusantara Jember.

The results showed that the distribution of profits in companies that apply sharia accounting has distributed profit not only to capital owners only. However, the profits earned are also distributed to related parties ie customers, employees and lakembak zakat, infaq and shodaqoh with Islamic values. While fairness in the distribution of profits when viewed objectively can not be fully done. Because the company still can not meet the criteria of justice for employees.

Keywords : *Profit Distribution, Syariah Accountancy, Justice, Syariah Banking, Syariah Enterprise Theory*

RINGKASAN

Analisis Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Laba Pada BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER; Monita Yuda Liantara; 140810401158; 2018; 79 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlahnya, Didalam akuntansi syariah tercantum catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat (Dr. Omar Abdullah Zaid). Akuntansi syariah menurut Karim (1990) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari system ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi (Hasyshi: 1986; Baydoun dan Willet, 2000 serta Harahap, 2001). Motivasi para pakar dan akademisi akuntansi terutama dari kalangan orang-orang Muslim guna mengkaji dan mengembangkan akuntansi syariah semakin meningkat. Setelah mengetahui beberapa peneliti (Gray, 1988; Perera, 1989; Hamid et al., 1993; Baydoun dan Willet, 1994) yang menguji hubungan antara budaya, religi dan akuntansi, menyatakan bahwa budaya secara umum dan Islam secara khusus mempengaruhi bentuk-bentuk akuntansinya.

Laba adalah suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya di pandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 1997, 330; Harapan 1997, 146 dalam triwuyono 2001). Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai

macam konsep laba terus bermunculan, termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya, secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari, dan secara pragmatis melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu di ukur dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam triwuyono 2001).

Di dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan di dalam syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusi laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerjasama di dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Maka prinsip syariah akan lebih dapat diciptakan dalam penerapannya, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil. Islam juga mendorong penganutnya untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang sudah berbasis syariah telah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam hal pendistribusian laba. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara nyata mengenai pendistribusian laba. Dari analisis tersebut nantinya akan mendapatkan hasil kesimpulan penelitian. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa BPRS asri masih belum bisa sepenuhnya memenuhi criteria keadilan dalam pendistribusian laba.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Laba Pada BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER “. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak. Selaku Pembimbing Utama yang tidak pernah lelah dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. Selaku Pembimbing Anggota yang sabar mengarahkan dan membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, beserta keluarga mulai dari nenek, om, tante yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberi dukungan Ficrine, Dhinar, dan Puji.
8. Sahabat-sahabat kampus yang selau memberi motivasi Mega, Siska, Yayik.
9. Mas Arie yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

DAFTAR ISI

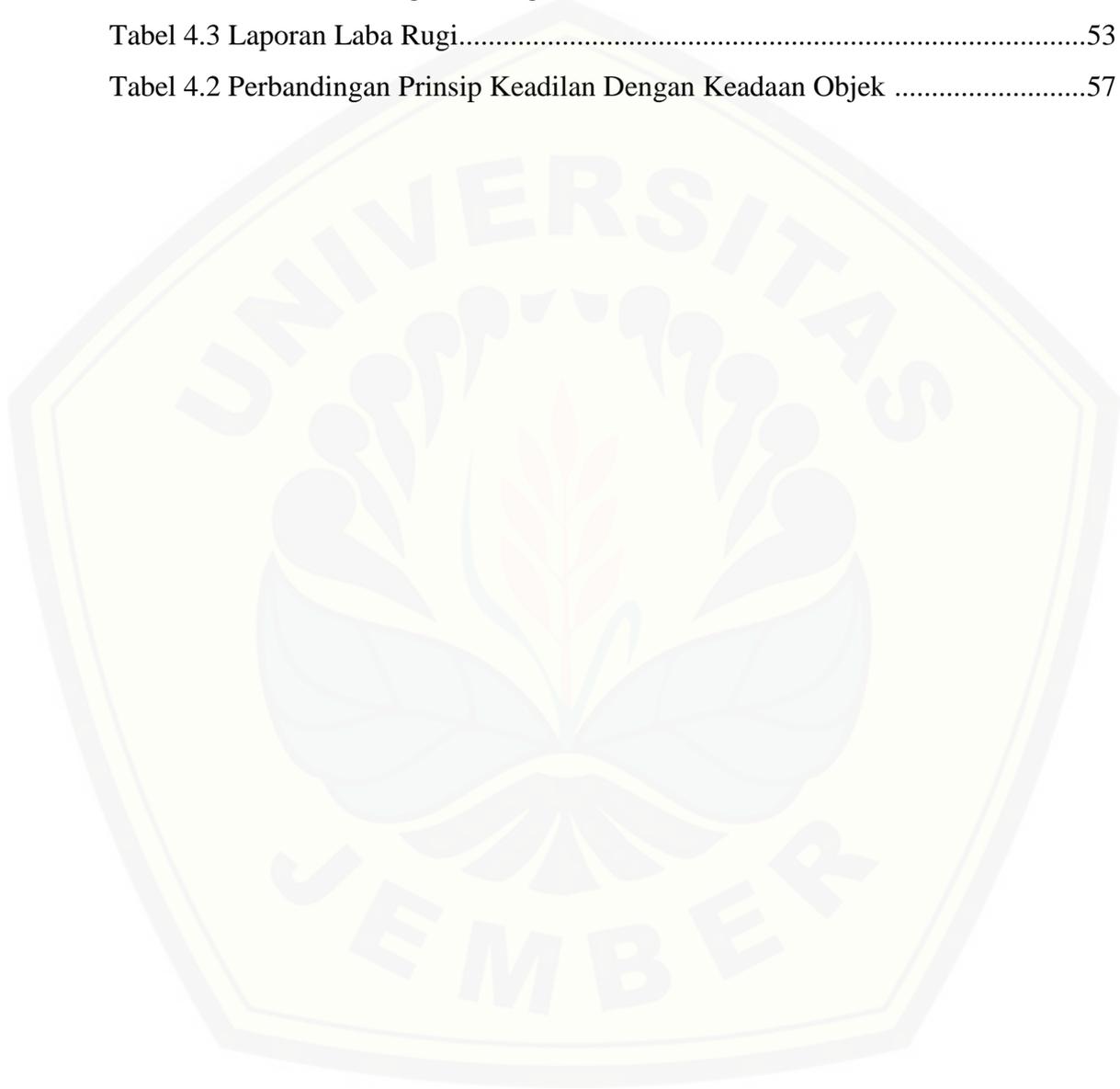
	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi	7
2.2 Akuntansi Syariah	8
2.2.1 Pengertian dan Perkembangan Akuntansi Syariah	8
2.2.2 Prinsip Akuntansi Syariah	9
2.3 Pengertian Bank Syariah	12
2.3.1 Karakteristik Bank Syariah	13

2.3.2 Tugas dan Fungsi Bank Syariah	13
2.3.3 Sistem Operasional Bank Syariah	14
2.4 Konsep Ekuitas	15
2.4.1 Proprietary Theory	15
2.4.2 Entity Theory	16
2.4.3 Enterprise theory	16
2.4.4 Syariah Enterprise Theory	17
2.5 Laba	19
2.5.1 Pengertian dan Konsep Laba Dalam Akuntansi Syariah	19
2.5.2 Pengukuran dan Pelaporan Laba	21
2.5.3 Jenis-Jenis Laba	22
2.5.4 Kegunaan Laba	23
2.6 Pendistribusian Laba	23
2.6.1 Distribusi Laba Untuk Nasabah.....	24
2.6.2 Distribusi Laba Untuk Karyawan	25
2.6.3 Distribusi Laba Untuk Pajak	26
2.6.4. Distribusi Laba Untuk Pajak	26
2.7 Laba Ditahan	29
2.8 Penelitian Terdahulu	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Analisis Data	34
3.6 Uji Keabsahan Data	36
3.7 Tahap Penelitian	36
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.1 Sejarah Bprs Asri Madani Nusantara Jember	38
4.1.2 Visi dan Misi Bprs Asri Madani Nusantara Jember	39

4.1.3 Struktur Organisasi Bprs Asri Madani Nusantara Jember	39
4.1.4 Produk dan Jasa	42
4.2. Distribusi Laba Untuk Karyawan	44
4.3. Distribusi Laba Untuk nasabah	48
4.4 Distribusi Laba Untuk Zakat	52
4.5. Distribusi Laba Untuk Pajak	55
4.6 Pembahasan Kesesuaian Dengan Prinsip Keadilan	56
BAB 5 PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Keterbatasan	62
5.3 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Bagi Hasil	51
Tabel 4.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	52
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi.....	53
Tabel 4.2 Perbandingan Prinsip Keadilan Dengan Keadaan Objek	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	41



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 data hasil wawancara65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlahnya, Didalam akuntansi syariah tercantum catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat (Dr. Omar Abdullah Zaid). Akuntansi syariah menurut Karim (1990) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari system ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi (Hasyshi: 1986; Baydoun dan Willet, 2000 serta Harahap, 2001). Motivasi para pakar dan akademisi akuntansi terutama dari kalangan orang-orang Muslim guna mengkaji dan mengembangkan akuntansi syariah semakin meningkat. Setelah mengetahui beberapa peneliti (Gray, 1988; Perera, 1989; Hamid et al., 1993; Baydoun dan Willet, 1994) yang menguji hubungan antara budaya, religi dan akuntansi, menyatakan bahwa budaya secara umum dan Islam secara khusus mempengaruhi bentuk-bentuk akuntansinya.

Di dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan pasti membutuhkan yang namanya modal. Modal disini merupakan hasil produksi yang dapat digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilai, daya beli, maupun kemampuan menggunakan barang-barang modal. Sumber modal pada dasarnya berasal dari dua sumber yaitu dari luar perusahaan (eksternal) dan dari dalam perusahaan (internal). Sumber

modal eksternal berasal dari pihak – pihak luar perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Pihak-pihak yang sering digunakan untuk memperoleh modal seperti bank, koperasi, kreditur, *supplier*, dan pasar modal. Sedangkan sumber modal internal berasal dari seluruh aktivitas maupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan laba (keuntungan). Modal internal umumnya berasal dari aktivitas laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Penanaman modal dalam perusahaan merupakan salah satu dari aktivitas investasi. Investor selalu dihadapkan pada konsekuensi risk and return dalam melakukan investasi. Dimana resiko investasi berupa capital loss, opportunity loss, menurunnya nilai investasi, kerugian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih kurs. Tetapi investor bisa memperoleh deviden dan capital gain sebagai keuntungan dalam investasinya.

Kepemilikan modal biasanya dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Orang-orang yang memiliki modal yang akan menikmati keuntungan itu. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa pemilik dengan jumlah dana yang diinvestasikan yang menciptakan laba dalam perusahaan, tetapi kita tahu bahwa bukan hanya pemilik dengan jumlah dana yang menciptakan laba, tetapi ada unsur-unsur yang terkait juga dalam menciptakan laba di dalam perusahaan.

Laba adalah suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya di pandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 1997, 330; Harapan 1997, 146 dalam triwuyono 2001). Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep laba terus bermunculan, termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang

mendefinisikannya, secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari, dan secara pragmatis melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu di ukur dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam triwuyono 2001).

Ada beberapa perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002;273) dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paing utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at islam. Di dalam sistem ekonomi islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli, dan distribusi kekayaan.

Wan Ismail Wan Yusoh (2001 dalam Harahap, 2001;212) mengemukakan beberapa syarat sebagai dasar-dasar akuntansi syariah, yaitu :

1. Benar dan sah, yang berarti seluruh transaksi yang terjadi di dalam perusahaan harus di catat dengan benar, tidak boleh ada yang di kurangi maupun di tambah
2. Adil, yaitu harus menempatkan sesuatu sesuai dengan perutukannya, di terapkan di semua situasi, dan harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang
3. Kebaikan, yang berarti harus dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari standar dan kebiasaan

Muhammad (2002) mencoba merumuskan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan membagi 2 bagian, yaitu :

1. Berdasarkan pengukuran dan penyingkapan, terdiri dari zakat, bebas bunga, dan halal
2. Berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana, yang terdiri dari ketaqwaan, kebenaran, pertanggungjawaban

Ada beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain pembayaran pinjaman dengan nilai pinjaman yang ditentukan sebelumnya harus sama tidak boleh berbeda, pemberi dana juga turut merasakan keuntungan maupun kerugian sebagai akibat dari hasil usahanya.

Di dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan di dalam syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusi laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerjasama di dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Maka prinsip syariah terutama prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapannya, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil. Islam juga mendorong penganutnya untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti Bprs asri madani nusantara Jember. Dimana dalam melaksanakan aktivitasnya masih terdapat kekurangan. Perusahaan masih belum bisa memenuhi standar kebutuhan karyawan. Standar kebutuhan karyawan yang disediakan oleh perusahaan masih terdiri dari ac, komputer, dan toilet saja. Padahal standar kebutuhan karyawan yang seharusnya disediakan oleh

perusahaan adalah adanya komputer, ac, toilet, kantin, dan kendaraan dinas. Maka dari itu, perusahaan masih jauh dari kata adil dalam pendistribusian laba terhadap karyawannya.

Penulis akan meneliti prinsip syariah yaitu prinsip keadilan yang sudah dijalankan di Bprs Asri Madani Nusantara Jember tersebut, dimana Bprs Asri Madani Nusantara Jember tersebut sudah menjalankan sistem syariah di dalamnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Bprs Asri Madani Nusantara Jember tersebut sudah benar-benar menjalankan sistem syariah pada pendistribusian labanya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip syariah yang dijalankan pada bprs asri itu dalam pendistribusian laba. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya menjelaskan prinsip keadilan secara umum pada bank syariah tanpa memberi patokan tentang nilai keadilan yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Terkait dengan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Laba Pada Bprs Asri Madani Nusantara Jember.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah BPRS Asri Madani Nusantara Jember sudah menerapkan prinsip keadilan dalam pendistribusian labanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis apakah BPRS Asri Madani Nusantara Jember sudah menerapkan prinsip keadilan dalam pendistribusian labanya

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam penelitian khususnya mengenai pendistribusian laba dalam akuntansi syariah

2. Manfaat bagi penulis

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan bagi penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti

3. Manfaat bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pendistribusian laba



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) “Menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil”.

Akuntansi dipandang sebagai suatu sistem untuk memberikan informasi (terutama keuangan) kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut.

Rudianto ”Menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha”.

Ikatan Akuntan Amerika “Menyatakan bahwa Akuntansi merupakan suatu potongan, estimasi, dan pelaporan data keuangan, yang memungkinkan sebuah penilaian dan pilihan membuat yang jelas dan tegas bagi individu yang memanfaatkan data”.

Kesimpulannya berarti akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

2.2 Akuntansi Syariah

2.2.1. Pengertian dan Perkembangan Akuntansi Syariah

Hal utama yang berkaitan dengan akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dan perintah yang ada dalam al-quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi.

Menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatatan transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Sesuai dengan surat al-baqarah 282, akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Angga Dini Sri Dewi, 2010). Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya memenuhi kepentingan pihak tertentu.

Salah satu hal yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah adanya kajian ulang tentang penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi (Muhammad, 2004). Oleh karena itu, dalam mengembangkan teori akuntansi syariah sudah seharusnya didasari oleh syariah atau sesuai dengan nilai-nilai islam. Teori akuntansi syariah yang dibangun untuk memahami praktik akuntansi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Perkembangan ideologi dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama islam, yang kemudian

mendorong perkembangan ekonomi islam sebagai bentuk refleksi idiologi islam tersebut. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi islam, sehingga munculah akuntansi syariah.

Faktor yang mendorong adanya kebutuhan akan akuntansi syariah adalah munculnya lembaga keuangan islam, sistem perbankan syariah, adanya skandal perusahaan skala internasional, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariah islam. faktor pertama merupakan faktor besar yang mendorong bangkitnya akuntansi syariah, adalah perkembangan lembaga keuangan islam yang begitu cepat, cepatnya perkembangan lembaga tersebut dibarengi dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan islam, termasuk bagaimana perlakuan akuntansi terhadap lembaga keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh ekonomi islam, khususnya lembaga keuangan islam adalah pada aspek teoritis, operasional, dan implementasi.

Menurut Sukardi, 2009 aspek teoritis yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah diperlukannya pengembangan prinsip, fisiologi, dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Pada tataran operasional, diperlukan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin, dan pengendalian resiko, sedang pada tahap implementasi diperlukan aplikasi sistem yang disesuaikan dengan regulasi dan kondisi masyarakat saat ini.

2.2.2. Prinsip Akuntansi Syariah

Secara umum prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surah al-Baqarah, ayat 282 yaitu prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan, yang kedua kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Menurut Subiyantoro (2004, 199) ada dua komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan dalam pendistribusian laba, yaitu :

- a) Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan bagi karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya. Standar kebutuhan karyawan sendiri meliputi pemberian fasilitas yang lengkap yang terdiri dari Ac, kantin, dan kendaraan dinas karyawan. Tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan (pemberian bpjs kepada karyawan), psikologi karyawan yaitu dengan cara pengembangan karir karyawan (kemampuan kepemimpinan dan SDM yang berdaya saing). Dan pemberian bonus kepada karyawan yang meliputi bonus retensi, bonus tahunan, dan bonus tanteim. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama. Dan yang terakhir yaitu pemberian kompensasi atau gaji kepada karyawan dengan melihat pendidikan, pengalaman, dan jabatan karyawan.
- b) Nasabah dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Pemilik dana disini yang dimaksud adalah nasabah. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai

dengan tatanan social masyarakat. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri, 1999):

- a. Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.
- b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Keadilan dalam akuntansi syariah merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-

masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

2.3. Pengertian bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan alam kegiatannya tidak membebankan bunga, kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut (Ismail, 2010:20).

Menurut Wibowo dan Hendy (2005:33), bank syariah adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik yang dikhawatirkan dan mengandung unsur riba. Kegiatan bank syariah ini diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa contoh bank syariah antara lain Syariah Mandiri, Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dan BRI Syariah.

2.3.1. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut (Triuwono, 2007):

- a. metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil yang menjadi ciri khas dari bank syariah
- b. dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi
- c. beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama saat akad pinjaman atau pembiayaan dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa berlakunya kontrak.

2.3.2. Tugas Dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tugas dan fungsi yang menjadi tujuan untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Adapun tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat
- b. bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang

berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

- c. bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf kehendak pemberi wakaf. Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang-undang.

2.3.3. System Operasional Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan juga harus melaksanakan mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana secara seimbang, yaitu harus sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Untuk itu harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Secara umum, konsep sistem operasional bank syariah adalah: (Yaya, dkk, 2014:51)

- a) Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
- b) Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
- c) Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang diperbolehkan.

- d) Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
- e) Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi dan lain sebagainya.

Sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan yang diperuntukkan pada nasabah yang akan menginvestasikan atau menyimpan harta mereka.

2.4. Konsep Ekuitas

2.4.1. Proprietary Theory

Konsep ini menempatkan pemilik sebagai pusat segala kepentingan yang mengarah pada konsekuensi legitimasi dan stimulasi perilaku egoistik serta individual dalam perilaku bisnis. Secara implisit theory ini mengekspresikan suatu hierarki kekuasaan atas kekayaan secara terpusat, bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replika perang sosial dimana wujud kompetensi secara interaktif meningkatkan intensitas dorongan mencari kekayaan (Setiabudi dan Triyuyono 2002).

Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kuno dan konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini Kam (1990). Perkembangan perusahaan-perusahaan yang makin besar dan dipengaruhi oleh lingkungan industri yang sangat cepat, dimana juga diikuti oleh perkembangan pasar uang dan konsekuensi dari reabilitas informasi akuntansi, mengakibatkan pendekatan ini menjadi tidak sesuai lagi. Kemudian munculah konsep entity teori yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, pembedaan dan pemisahan kepemilikan.

2.4.2. Entity Theory

Ide utama dari entity teori ini adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada proprietary teori (pemilik) menjadi pusat perhatian Kam (1990). Unit usaha menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukannya pemilik. Entitas dikonsepsikan memiliki eksistensi terpisah Belkaoui (2006).

Konsep ini merupakan evolusi dari konsep proprietary teori, namun apabila diinterpretasikan secara kritis (khususnya dalam konsep kepemilikan), sebagian besar muatannya tetap berbasiskan aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep proprietary teori. Entity teori memiliki kepentingan yaitu informasi akuntansi yang sebesar-besarnya untuk pemilik modal, agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam sekaligus mendapatkan laba yang maksimal.

Triyuwono dalam Mulawarman (2009) menjelaskan bahwa sebenarnya model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu. Artinya keberlangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan sendiri oleh pemilik. Tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh banyak pihak seperti pelanggan, kreditur, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah dan lain-lain (stakeholder) yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu menurut Triyuwono (2006) kedua teori tersebut tidak akan mampu mewartakan kemajemukan stakeholder dan percepatan bisnis yang ada saat ini, dan untuk mengatasi hal ini diperlukan alternatif yang tepat, yaitu enterprise teori.

2.4.3. Enterprise theory

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proprietary teori dan entity teori tidak akan mampu mewartakan kemajemukan stakeholder dan bisnis pada saat ini. Untuk mengatasi hal ini diperlukan wadah alternatif yang lebih tepat

dan sesuai dengan lingkungannya. Wadah tersebut, seperti yang telah disampaikan beberapa penulis (Slamet 2001, Triwuyono 2006) adalah enterprise teori.

Enterprise teori dalam hal ini memiliki tidak hanya sifat egois namun juga sudah mengadopsi sifat altruistik. Pendapat serupa diungkapkan juga oleh Triwuyono (2006) yang mengatakan bahwa “ akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholder dan Tuhan “ .

Pusat perhatian dalam teori ini adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entitas. Pandangan enterprise teori dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggung jawaban sosial. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para stakeholder secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan. Tujuan perusahaan menurut enterprise teori adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Konsep enterprise teori memang dekat dengan syariah. Namun dari sudut pandang syariah belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Artinya konsep ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa konsep ini telah menjadi konsep teoritis akuntansi syariah sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect participants. Tetapi secara normatif indirect participants ini mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan.

2.4.4. Syariah Enterprise Theory

Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan stockholders merupakan implikasi penggunaan entity theory (atau sebaliknya). Entity theory sangat jauh dengan konsep Islam, karena entity theory memiliki nilai individual dan profit

orientied, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Harahap (1997) dalam Triyuwono (2006,350) berpendapat :

“Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: proprietary theory, entity theory, dan enterprise theory. Maka akan saya jawab enterprise theory karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. Enterprise theory menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.”

Triyuwono (2006, 35) juga mengungkapkan:

“Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.”

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh stockholders adalah enterprise theory. Hal ini demikian karena enterprise theory memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).

Akan tetapi, enterprise theory masih bersifat ‘duniawi’ dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggung jawaban. Dengan demikian, dalam pandangan syariah enterprise theory, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill.

2.5. Laba

2.5.1. Pengertian dan Konsep Laba dalam Akuntansi Syariah

Dalam akuntansi syariah, dari transaksi tersebut didapatkan pendapatan yang berupa laba. Laba tersebut berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli), dan upah atas jasa.

Di dalam kehidupan yang nyata konsep laba sangat diperlukan dalam proses dunia usaha dan bisnis, di mana konsep ini sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan bagi pihak tertentu dan berguna dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan dikeluarkan.

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002:273), dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya :

- a) Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak
- b) Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan miskin

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Triyuwono, 2001). Zakat merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Selain pembayaran zakat, larangan sistem bunga juga berkaitan dengan pembahasan konsep laba. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai peserta (pemilik) usaha (Triyuwono 2001; 3). Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam.

Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan

untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Beberapa perbedaan lain antara akuntansi syariah dengan konvensional misalnya pada masalah tujuan akuntansi.

Sedangkan pada akuntansi syariah menyatakan bahwa akuntansi syari'ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional.

Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat penghubung antara stockholders, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa dari pihak manapun sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi stockholders dan para akuntan dan ibadah sosial bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik. Akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai enterprise theory, di mana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (stockholders) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil: pekerja, konsumen, pemasok, akuntan, dll.

Bentuk laporan keuangan perusahaan yang lebih cocok dengan akuntansi islam adalah value added reporting bukan laporan laba rugi konvensional. Laporan value added reporting cenderung kepada prinsip-prinsip pertanggungjawaban sosial. Dalam value added reporting informasi yang disajikan meliputi laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.

2.5.2. Pengukuran dan Pelaporan Laba

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari

pendapatan, maka konsep penghimpunan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan.

Ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang atas laba usaha (Belkaoli 1997; 230) yaitu :

- a. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik menganggap ‘laba akuntansi’ sebagai laba usaha.
- b. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, konsep laba aliran neo-klasik adalah “laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum”.
- c. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (current value) sebagai dasar penilaian bukan historical cost lagi.
- d. Aliran noe radikal yang menggunakan current value tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum.

2.5.3. Jenis-Jenis Laba

Jenis-jenis laba menurut Theodorus M. Tuanakotta. Theodorus M. Tuanakotta (2001) :

1. Laba kotor

Merupakan perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan. Laba kotor sendiri gambaran umum mengenai keuntungan yang diperoleh oleh sebuah usaha. Belum bisa digunakan atau dialokasikan sepenuhnya karena masih harus diproses untuk mendapatkan laba bersih.

2. Laba dari operasi

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.

3. Laba bersih

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain, dapat diketahui bahwa laba bersih adalah keuntungan perusahaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang ditanggung dalam operasional perusahaan.

2.5.4. Kegunaan Laba

Menurut Suwardjono (2005, 456), laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain :

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
- f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- i. Dasar pembagian dividen

2.6. Pendistribusian Laba

Menurut Sitepu (2005, 38), pendistribusian *net income* perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut :

- a. Net Income to Stockholders. Pandangan yang paling tradisional dan telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil pengembalian (return) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba

yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik.

- b. Net Income to Investor. Sesuai dengan entity theory, pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara pemilikan (ownership) dan pengendalian (control) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap aset dalam likuidasi. Dalam entity theory, income bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang preferred common stock, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah penerimaan manfaat dari perusahaan dalam pengertian seperti investor.
- c. Net Income to Residual Shareholders. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh karena itu, prioritas dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hal residu.

2.6.1. Distribusi Laba untuk Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Perusahaan tidak boleh bersifat adil hanya kepada karyawannya. Tetapi kepada para nasabah perusahaan juga harus bisa adil. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.

Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik

2.6.2. Distribusi Laba Untuk karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif. Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhelifahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik

kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

2.6.3. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1), pajak adalah:

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu

tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan

2.6.4. Distribusi Laba untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2007;36), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103).

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007; 36). Menurut Qardawi (2007;36) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapahadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Qadrawari (2007;122), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

- a. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih”. (Q.S.9:34)
- b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya” (Q.S. 6:141)
- c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu” (Q.S. 2;276)
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan. Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun

kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungian kekayaan.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Syafei, 2008 dalam Nurhayati, 2009; 285)

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2009;285) tentang zakat perusahaan yang berisi:

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- b. Bidang usaha harus halal
- c. Aset perusahaan dapat dinilai
- d. Aset perusahaan dapat berkembang
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

2.7. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan.

Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009:60), antara lain:

1. Alasan perundang-undangan
2. Alasan kontrak
3. Alasan kemungkinan kerugian
4. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Akan tetapi adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya.

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswi dari Universitas Hasanudin Makasar (2012) dengan melihat apakah perusahaan sudah mencapai prinsip keadilan dalam pendistribusian laba. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder. Hal ini juga disadari oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan mendistribusikan labanya kepada pemilik dana yang terdiri dari pemegang saham dan nasabah, para karyawan, zakat, pajak, dan cadangan umum sebagai syarat dari Bank Indonesia untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja. Laba yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Bank Muamalat tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materil. Misalnya para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka. Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah seperti atm, international banking dll. Para pemegang saham diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, Maysir, Gharar, dan haram telah diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam aktivitas usahanya.

Penelitian yang selanjutnya yaitu dilakukan mahasiswa dari Universitas Hasanudin Makasar (2011) Dengan melihat pemahaman para praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap nilai-nilai syariah. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Nilai humanis dalam pemahaman praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat

Syariah Niaga Madani ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang humanis. Hal ini bisa dilihat dari prinsip bagi hasil yang dibangun dengan prinsip-prinsip syariah yang erat kaitannya dengan akuntansi syariah yang humanis. Pemahaman para praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap nilai emansipatoris walaupun mendapatkan kriteria yang cukup memadai, namun menurut pengamatan penulis pemahaman mereka masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan praktis yang ada saat ini, belum sampai pada pemahaman akuntansi syariah filosofis-teoritis dalam rangka membangun akuntansi syariah yang emansipatoris. Praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada Tuhan pada akhirnya dengan *falah*. Sesuai dengan tujuan transendental akuntansi syariah, bahwa akuntansi tidak hanya memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada semua manusia, dan kepada alam semesta. Praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani syariah paham bahwa mereka adalah *khalifah* di muka bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bprs Asri Madani Nusantara Jember yang bergerak dibidang perbankan syariah di Jalan Sentot Prawirodirdjo No. 02 Jember. Objek penelitian ini sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan pimpinan, salah satu karyawan, dan salah satu nasabah
2. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen yang terkait.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu dengan cara langsung mendatangi perusahaan dimana peneliti dapat melakukan penelitian dengan menemui pihak-pihak terkait yang dapat memberikan data yang relevan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dari perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tatap muka atau langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak Bprs Asri Madani Nusantara Jember, dan salah satu pnsabah terkait dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan dari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Menurut Miles dan Hubberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91) antara lain :

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data secara objektif melalui wawancara dan memeriksa bukti-bukti transaksi di lapangan
- b. Reduksi data, dimana peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dibutuhkan

- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Nantinya data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk naratif dengan skema agar lebih mudah dipahami.
- d. Menganalisis pendistribusian laba sesuai dengan prinsip syariah
Membandingkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya dengan prinsip-prinsip syariah
- e. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, berarti setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan jika data yang diperoleh oleh peneliti tidak mendukung penelitian yang dilakukan

Berikut prinsip-prinsip yang digunakan sebagai indikator keadilan dalam pendistribusian laba:

Secara umum prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surah al-Baqarah, ayat 282 yaitu prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan, yang kedua kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Menurut Subiyantoro (2004, 199) ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan dalam pendistribusian laba, yaitu :

- 1) memenuhi standar kebutuhan karyawan yang meliputi adanya ac, computer, kantin, toilet, dan kendaraan dinas bagi para karyawan
- 2) pemberian bpjs kepada karyawan
- 3) psikologi karyawan (pengembangan karir karyawan)

- 4) pemberian bonus kepada karyawan. Yang terdiri dari bonus retensi, bonus tahunan, dan bonus tanteim
- 5) pemberian kompensasi atau gaji. Dengan melihat pendidikan dan pengalaman karyawan, posisi jabatan
- 6) terdapat kegiatan usaha
- 7) memiliki batasan waktu dalam membagikan pembagian keuntungan
- 8) ada kesepakatan pembagian keuntungan
- 9) zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada, yaitu 2.5% dari asset wajib zakat
- 10) pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan

3.6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan untuk menentukan kredibilitas (derajat kepercayaan) adalah dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang digunakan sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data yang digunakan adalah:

Triangulasi dengan sumber

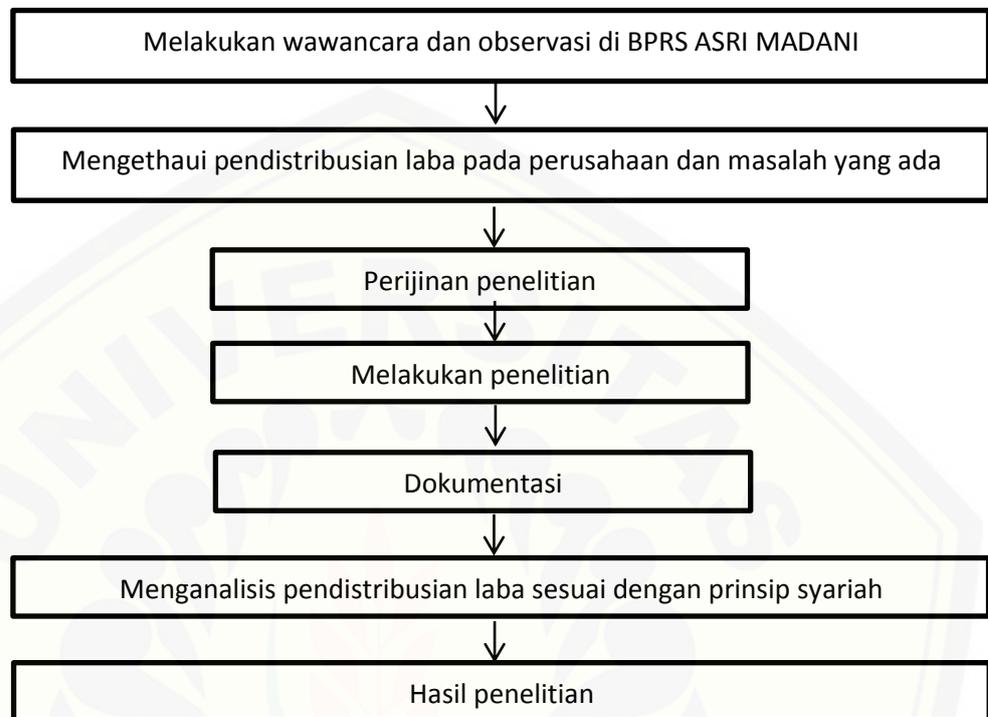
Triangulasi dengan sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan wawancara

3.7. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah gambaran langkah kerja yang akan dilakukan oleh peneliti agar lebih terarah. Adapun tahapan penelitian akan disajikan di lampiran

Gambar 3.1
Tahapan Penelitian



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapannya, perusahaan masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan pada pendistribusian laba. Hanya sebagian yang sudah memenuhi kriteria keadilan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu keadilan bagi dalam pendistribusian nasabah, pendistribusian laba kepada pajak dan zakat. Selain itu perusahaan masih menerapkan sebagian kriteria keadilannya kepada para karyawan.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu peneliti hanya membahas tentang prinsip keadilan saja. Sehingga tidak membahas secara mendalam setiap prinsip-prinsip syariah yang ada. Yang seharusnya terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Dan peneliti juga memiliki keterbatasan dalam perolehan data.

5.3. Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menutupi keterbatasan dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan agar meneliti lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang ada. Yang terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Dan memperbanyak perolehan data dari nasabah juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Heni Werdi 2017. Akuntansi Syariah : sebuah tinjauan antara teori dan praktik. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No. 2.
- Alim, Mohammad Nizarul 2011. Akuntansi Syariah : Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi. Jurnal Investasi. Vol. 7 No. 2.
- Belkaouli, Ahmed. 1997. *Teori Akuntansi. (terj. Dukat, Erwan, et. al.)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fajar, Tri Dya Fitrisah. 2012. “ANALISIS Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK”. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin.
- <https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/11/konsep-laba-dalam-pelaporan-keuangan/>.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol 2. No. 2 Agustus 2002: 57 – 101.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jayanto, Prabowo Yudo 2017. Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 1.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.

- Sitepu, Waktu. 2005. *Analisis perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Akuntansi konvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung .
- Subiyantoro. 2004. *Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Jawa-Timur: Banyumedia Publishing.
- Triuwono, Iwan. 2006. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Triuwoni, Iwan. dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo dan Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yaya, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan PrakteKontenporer*. Jakarta: Salemba empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara

Narasumber: Account Officer (Fendik)

1. Fasilitas apa saja yang disediakan perusahaan disini pak?

“ iya disini fasilitas yang tersedia masih berupa ac, komputer, dan toilet saja. Sementara masih itu saja fasilitas yang disediakan di bprs asri. Tapi untuk kedepannya mungkin ada penambahan fasilitas di kantor.”

2. Pak apakah perusahaan memberikan jaminan kesehatan untuk setiap karyawan disini?

“ iya mbak disini juga memberikan jaminan kesehatan untuk karyawan, jadi semisal karyawan disini ada yang sakit, dan harus masuk rumah sakit. Karyawan tersebut hanya menunjukkan kartu bpjsnya, maka akan mendapat potongan untuk pembayaran rumah sakit. Dan untuk pembayaran bpjs tiap bulannya, di potong 3% dari gaji perbulannya.”

3. Apa saja yang diterima oleh karyawan selain gaji Pak?

“iya di bprs asri juga memberikan bonus untuk karyawannya. Yaitu bonus tahunan mbak. Dan pemberian bonus tahunan ini juga tergantung pada laba perusahaan tahun sebelumnya. Jadi bonus tahun 2016, akan dibagikan kepada karyawan pada tahun 2017”

4. Apakah ada criteria khusus untuk pemberian gaji kepada karyawan pak?

“Ya pemberian gaji kepada karyawan disini berdasarkan pengalaman kerja dan jabatan mbak. Jadi untuk karyawan yang pengalaman kerjanya lebih lama, akan menerima gaji yang lebih tinggi, dibandingkan dengan karyawan yang baru bekerja di bprs, dan karyawan yang memiliki jabatan lebih tinggi, akan menerima kompensasi yang lebih tinggi juga.”

Hasil wawancara**Narasumber: Costumer Service (Friska)**

1. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh perusahaan disini mbak?

“ untuk fasilitas di bprs asri disini ada ac, dan toilet ya ditambah dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya mbak.”

2. Apakah perusahaan juga memberikan jaminan kesehatan untuk setiap karyawannya?

“iya perusahaan juga memberikan jaminan kesehatan untuk para karyawannya mbak, jadi untuk pembayarannya itu dipotong dari gaji karyawan sebesar 3%.”

Hasil wawancara**Narasumber: Kabag Keuangan (Setyowati W)**

1. Apa saja yang diterima oleh karyawan selain gaji mbak?

“iya mbak kita sebagai karyawan juga menerima bonus. Jadi tidak hanya gaji yang kita terima, bonus tahunan juga diterima oleh para karyawan setiap tahunnya.”

2. Apa ada criteria kusus untuk pemberian gaji kepada kayawan disini mbak?

“ada mbak, jadi pemberian gaji kepada karyawan disesuaikan dengan pengalaman kerja mereka dan juga disesuaikan dengan posisi jabatan mereka mbak.”

Hasil wawancara

Narasumber: Kabag Akuntansi (Tutut)

1. Apakah pembagian nisbah bagi hasil pada perusahaan disini semua sama rata bu?

“jadi mbak, untuk nasabah di dalam perusahaan ini ada 3 macam. Yang pertama nasabah tabungan, nasabah pembiayaan, dan nasabah deposito. Masing-masing dari nasabah tersebut mempunyai nisbah bagi hasil yang berbeda beda. Untuk nasabah tabungan nisbah bagi hasilnya 24%, untuk nasabah tabungan 40%, dan untuk nasabah deposito untuk yang 1bulan nisbah bagi hasilnya 28%, untuk yang 3bulan nisbah bagi hasilnya 30%, untuk yang 6bulan 32%, dan untuk yang 12bulan 36%. Itu ketentuan perusahaan mbak, jadi pertama nasabah yang akan melakukan transaksi terlebih dahulu dijelaskan tentang nisbah bagi hasil, setelah itu melakukan kesepakatan untuk nisbah bagi hasilnya.”

2. Apakah perusahaan setiap tahunnya mengeluarkan zakat?

“disini perusahaan mengeluarkan zakat setiap tahunnya mbak. dimana pembayaran zakat yang dibayarkan diambil dari 2.5% asset wajib zakat. Jadi Alhamdulillah dari tahun ke tahun zakat yang kita keluarkan bertambah. Di tahun 2016 zakat yang dikeluarkan perusahaan 6.411 dan tahun 2017 mengeluarkan zakat sebesar 13.182”

3. Apakah perusahaan setiap tahunnya juga patuh dalam pembayaran pajak?

“perusahaan setiap tahunnya selalu bayar pajak mbak. untuk pembayaran pajak pada perusahaan disesuaikan dengan penghasilan setiap tahunnya mbak. BPRS madani membayarkan pajak tahun 2017 40.289 penghasilan yang di dapat oleh perusahaan pada tahun 2017 473.777. sedangkan pada tahun 2016 perusahaan membayarkan pajaknya sebesar 37.843, penghasilan yang di dapat pada tahun 2016 250.012. itu artinya dari tahun 2016 ke tahun

2017 pembayar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan meningkat, karena penghasilan yang didapat oleh perusahaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 juga meningkat. ”



Lampiran II

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Asri Madani Nusantara
RUKO GRAHA WIJAYA NO. 1 JL. DARMAWANGSA, SUKORAMBI
Periode: Desember-2017**

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo rata - rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Nisbah	Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return %
	A	B	C	D	E
Tabungan Mudharabah	10,033,886	160,712	24	38,570	4,61
Deposito Mudharabah 1 Bulan	6,609,142	105,900	28	29,652	5,38
Deposito Mudharabah 3 Bulan	110,500	1,770	30	531	5,77
Deposito Mudharabah 6 Bulan	27,000	437	32	139	6,18
Deposito Mudharabah 12 Bulan	367,600	5,870	36	2,113	6,90
Total	17,148,128	274,689	-	71,005	4,97

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Asri Madani Nusantara
RUKO GRAHA WIJAYA NO. 1 JL. DARMAWANGSA, SUKORAMBI
Periode: Desember-2017
Laporan Laba Rugi**

No	Pos-pos	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	4,035,060	3,809,303
	1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	3,807,992	3,596,823
	a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	3,722,370	3,474,375
	b. Dari Bank Indonesia	0	0
	c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	85,622	122,448
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	227,068	212,480
II	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,589,463	1,454,199
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank	1,159,206	994,604
	a. Tabungan Mudharabah	467,878	425,622
	b. Deposito Mudharabah	637,930	432,281
	c. Lainnya	53,398	136,701
	2. Bank Indonesia	0	0
	3. Bank - bank lain	430,257	459,595
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	2,445,597	2,355,104
IV	BEBAN OPERASIONAL	1,913,144	2,122,913
	1. Bonus Titipan Wadiah	0	0

	2. Beban Administrasi dan Umum	520,922	454,253
	3. Beban Personalia	1,310,302	1,317,449
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	10,000	305,105
	5. Lainnya	71,920	46,106
V	LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	532,453	232,191
VI	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	1,708	66,673
VII	BEBAN NON OPERASIONAL	6,913	4,598
VIII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	527,248	294,266
IX	ZAKAT	13,182	6,411
X	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	40,289	37,843
XI	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	473,777	250,012